

Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) dalam Perspektif Strategi Perang Semesta

Endro Nurbantoro¹, I Wayan Midhio², Helda Risman³, Lukman Yudho Prakoso⁴,
Joni Widjayanto⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pertahanan

e-mail: endronurbantoro1197@gmail.com¹, wayan.midhio@idu.ac.id²,
rismancan@gmail.com³, lukman.prakoso@idu.ac.id⁴, joni.widjayanto@idu.ac.id⁵

Abstrak

Negara Indonesia menerapkan sistem pertahanan yang bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Konsep Perang Semesta lahir pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949), dimana Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit dan kritis pasca proklamasi kemerdekaan akibat kedatangan Belanda yang ingin kembali menduduki Indonesia. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, bangsa Indonesia harus berjuang menghadapinya, baik melalui perjuangan diplomasi maupun perjuangan bersenjata. Kedua bentuk perjuangan ini dilakukan secara bergerilya dan mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki. Berpijak dari fenomena tersebut, maka penulis tergugah untuk menganalisa lahirnya konsep Perang Semesta yang bersumber dari pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia selama masa Perang Kemerdekaan tahun 1945-1949. Pembahasan pada artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah, dimana dalam prosedur penyusunannya melalui empat tahapan, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Analisa data yang digunakan adalah analisa historis, dengan penekanan pada ketajaman dalam menginterpretasi fakta sejarah. Dari analisis yang dilakukan, dapat dibuktikan bahwa selama Perang Kemerdekaan pada tahun 1945-1949, perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi dapat berjalan secara paralel dan saling menguatkan. Hakikat kesemestaan telah tertanam pada kedua bentuk perjuangan tersebut dengan adanya dukungan dan mobilisasi rakyat, pengerahan segenap sumber daya yang dimiliki serta seluruh wilayah perjuangan.

Kata kunci: *Diplomasi, Gerilya, Mobilisasi, Perang Semesta*

Abstract

The Indonesian state implements a comprehensive defense system, meaning that it involves all the people and all national resources, national facilities and infrastructure, as well as the entire territory of the country as one defense unit. The concept of the Total War was born during the Indonesian War of Independence (1945-1949), where Indonesia was faced with a difficult and critical situation after the proclamation of independence due to the arrival of the Dutch who wanted to re-occupy Indonesia. With all its limitations, the Indonesian nation must fight against it, both through diplomatic struggles and armed struggles. Both forms of struggle are carried out in guerrilla and mobilizing all available resources. Based on this phenomenon, the author is moved to analyze the birth of the concept of the Total War which originates from the historical experience of the Indonesian struggle during the War of Independence in 1945-1949. The discussion in this article uses a qualitative research method using a historical approach, in which the preparation procedure goes through four stages, namely: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The data analysis used is historical analysis, with an emphasis on sharpness in interpreting historical facts. From the analysis carried out, it can be proven that during the War of Independence in 1945-1949, the armed struggle and the diplomatic struggle could run parallel and mutually reinforcing. The essence of the totality

has been embedded in these two forms of struggle with the support and mobilization of the people, the mobilization of all the resources they have, and the entire territory of struggle.

Keywords : *Diplomacy, Guerrilla, Mobilization, Total War*

PENDAHULUAN

Pada 15 September 1945, tentara Inggris yang tergabung dalam AFNEI (*Allied Forces Netherlands East Indies*) selaku wakil sekutu tiba di Indonesia, mereka bertugas untuk melucuti tentara Jepang (Press, 2021), membebaskan para tawanan, dan mengembalikan tentara Jepang ke negaranya (Kusuma, Anwar, Risman, & Arief, 2021). Kedatangan mereka ternyata diboncengi oleh NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang bermaksud untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara jajahan Hindia Belanda. Hal itu didasarkan pada *Civil Affairs Agreement*, yang menyatakan bahwa sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II memiliki hak atas kekuasaan Jepang diberbagai wilayah jajahannya, termasuk di Indonesia. NICA yang dipimpin Dr. Hubertus J van Mook, membawa misi untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (*statkundige concepti* atau konsepsi kenegaraan), yang menyatakan bahwa akan dibentuk persemakmuran dipimpin Ratu Belanda dengan anggota diantaranya Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda (Supriadi & SH, 2021).

Belanda memiliki keinginan kuat untuk dapat menguasai kembali Indonesia dengan menyiapkan kekuatan militernya yang cukup besar. Menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia melakukan upaya dengan memilih jalan perundingan (diplomasi) dan perlawanan bersenjata secara gerilya. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase dan biasanya dalam kelompok yang kecil tapi sangat fokus dan efektif. Untuk dapat menerapkan taktik gerilya yang efektif dituntut kemampuan untuk menguasai wilayah dan mendapatkan dukungan rakyat, baik dalam hal dukungan logistik maupun informasi tentang keberadaan musuh. Faktor kerahasiaan menjadi kunci keberhasilan taktik gerilya dan itu sangat dipengaruhi oleh dukungan rakyat. Dari taktik gerilya inilah yang kemudian melahirkan suatu rumusan konsep pertahanan negara Indonesia yaitu Perang Semesta, dimana dukungan dan keterlibatan seluruh rakyat Indonesia menjadi fondasi utama dalam penerapannya.

Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta, karena dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh warga negara, memanfaatkan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Konsep dari Sistem Pertahanan Semesta lahir atas pandangan dan pemikiran yang didasari pada pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya pada masa Perang Kemerdekaan tahun 1945-1949. Sejarah pemikiran tentang konsep Perang Semesta di Indonesia tidak terlepas dari pemikiran T.B. Simatupang dan A.H. Nasution, yang memberikan pokok-pokok pikirannya dan dibahas bersama dengan Jenderal Soedirman untuk menghasilkan strategi baru dan dituangkan dalam Perintah Siasat Nomor 1. Dalam Perintah Siasat itu memutuskan untuk kembali melakukan gerilya, meninggalkan cara-cara pertahanan linier dan supaya membentuk kelompok-kelompok gerilya yang didesentralisasi.

Masa Perang Kemerdekaan tahun 1945-1949 dipilih dalam pembahasan ini, karena pada masa itulah Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Upaya mempertahankan dan merebut kemerdekaan dilakukan dengan perjuangan bersenjata dan berdiplomasi, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kokoh bagi sistem pertahanan negara Indonesia hingga saat ini. Perjalanan sejarah bangsa tersebut telah memberikan bukti yang meyakinkan bahwa Perang Semesta adalah sistem yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Bagi Angkatan Perang, sejarah perjuangan kemerdekaan itu mengandung pula bahan-bahan untuk dapat mengembangkan teori-teori tentang masalah taktik dan organisasi. Oleh sebab itu kita harus berusaha untuk mencatat sejarah perjuangan kemerdekaan itu selengkap mungkin dan sejujur mungkin.

METODE PENELITIAN

Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tinjauan berdasarkan pendekatan sejarah. Adapun penulisannya bersifat deskriptif, dengan memberikan penggambaran secara spesifik dari suatu situasi, mekanisme maupun proses berdasarkan informasi yang bersifat elementer sehingga akhirnya akan dapat menghasilkan suatu penjelasan atas fenomena yang diteliti (Nurbantoro, Risman, Widjayanto, & Anwar, 2021). Analisa dilakukan dengan cara studi terhadap dokumen-dokumen dari sumber yang ada. Dari dokumen-dokumen yang ada, melalui penelusuran secara historis dikumpulkan data yang diperlukan. Data-data historis terkait Perang Kemerdekaan pada tahun 1945-1949 dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis historis dengan pendekatan kualitatif. Data yang telah dikumpulkan tersebut diolah menjadi data yang relevan atau sebagai suatu kritik. Proses kritik tersebut menjelaskan apakah sumber tersebut valid, sesuai waktu dan tempat, dapat dipercaya, dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data yang relevan untuk diolah menjadi fakta melalui penafsiran-penafsiran yang objektif, tanpa tendensi atau kepentingan apapun. Langkah terakhir adalah penyajian fakta-fakta dalam bentuk tertulis yakni historiografi (Bungin, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerilya Sebagai Pilihan

Situasi yang dijumpai oleh sekutu dan Belanda pada saat tiba di Indonesia diluar dari dugaan mereka, Indonesia ternyata telah menyatakan kemerdekaannya, meskipun hal itu tidak diakui oleh Belanda. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara pihak Belanda dengan Indonesia, yang diawali oleh peristiwa “Perobekan Bendera Belanda di Hotel Yamato”, Surabaya pada 19 September 1945. Setelah tersiar kabar adanya bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato, ribuan arek-arek Suroboyo yang didominasi pemuda ramai mendatangi hotel tersebut. Pengibaran bendera Belanda, dianggap tidak menghormati harga diri Indonesia yang telah dinyatakan berdaulat. Keinginan Belanda untuk kembali menduduki Indonesia berdampak pada bangkitnya kembali semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan kemerdekaan seutuhnya. Perlawanan dan pertempuran terjadi di beberapa daerah, seperti: pertempuran Bojong Kokosan, pertempuran Lima Hari di Semarang, peristiwa 10 November di Surabaya, pertempuran Medan Area, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api.

Perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia mendorong Belanda untuk melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati. Namun, realisasi perjanjian itu tidak berjalan dengan mulus sehingga pada 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum agar Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pemimpin Indonesia menolak permintaan Belanda tersebut sehingga pada 20 Juli 1947, Van Mook menyatakan Belanda tidak terikat lagi pada Perundingan Linggarjati dan melakukan Agresi Militer Belanda I (*Operatie Product*). Agresi ini bertujuan untuk merebut daerah-daerah di Indonesia, terutama yang memiliki kekayaan dan sumber daya alam. Aksi Belanda ini mereka anggap sebagai tindakan polisional. Kekuatan pasukan Belanda saat itu cukup besar, lebih dari 100.000 orang, dengan persenjataan modern, termasuk persenjataan berat hibah dari tentara Inggris dan Australia.

Menghadapi aksi ini, bagi pasukan Indonesia hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Keunggulan teknis dari pasukan Belanda telah mampu menembus daerah pertahanan Indonesia jauh ke dalam, sementara perlawanan yang dilakukan tentara Indonesia hanya bertahan, melakukan serangan balas secara frontal dan melakukan aksi bumi hangus dengan tujuan untuk menghambat gerakan pasukan Belanda. Aksi Belanda ini telah menyebabkan kekuatan tentara Indonesia menjadi tercerai berai. Pada Agresi Militer Belanda I, tentara Indonesia banyak mengalami kegagalan dan kekalahan taktis di mana-mana, di semua front Belanda berhasil menerobos garis-garis pertahanan Indonesia (Notosusanto, 1979). Faktor penyebab dari kegagalan itu adalah tentara Indonesia hanya mampu melakukan pertahanan linier

terhadap serangan Belanda dihadapkan pada kondisi persenjataan yang terbatas dan susunan pasukan yang belum tertata dengan baik.

Kegagalan menghadapi Agresi Militer Belanda I menjadi pukulan telak bagi para pemimpin militer Indonesia, Nasution sebagai Panglima Divisi Siliwangi menginstruksikan pasukan yang ada di Jawa Barat untuk segera meninggalkan cara-cara pertahanan linier dan membentuk kelompok-kelompok gerilya yang didesentralisasi. Hal ini menguatkan pendapat Samuel Huntington's, yang mendefinisikan perang gerilya sebagai strategi perang kelompok yang lemah dengan menggunakan taktik ofensif. Strategi gerilya merupakan senjata dari pihak yang lemah. Perang gerilya tidak digunakan dalam peperangan biasa (Poetri, 2021). Sehingga perang gerilya pada umumnya adalah strategi perang antara si lemah melawan si kuat, dengan tujuan memenangkan perang. Musuh yang menggerakkan tentaranya untuk memadamkan pemberontakan hanya mungkin efektif dilawan dengan cara gerilya. Gerilya yang dibantu dengan semangat rakyat sederhana dan kecil, mampu mengimbangi tentara musuh yang besar lengkap dan teratur. Api semangat perjuangan yang menyala dalam sanubari, memberikan kekuatan untuk menyanggupi segala penyerbuan dan ujian yang berat. Oleh karena itu tentara-tentara gerilya bukanlah hanya sebagai pejuang biasa, melainkan sebagai pelopor (Narasi., 2012).

Keberhasilan yang diperoleh Belanda pada Agresi Militer I, menimbulkan keinginan Belanda untuk melanjutkan aksinya merebut Yogyakarta dengan melakukan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Jenderal Soedirman meminta Presiden Soekarno untuk ikut serta bergerilya bersama pasukannya, namun ajakan tersebut ditolak oleh Soekarno. Aksi ini berakibat pada jatuhnya ibu kota negara dan penangkapan para pemimpin bangsa, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Untuk tetap menjaga eksistensi negara, maka dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Sementara itu, Jenderal Soedirman menyatakan akan tetap meneruskan perjuangan "met of zonder pemerintah, tentara akan berjuang terus". Berdasarkan perintah kilat No 1/PB/D/48 tanggal 19 Desember 1948 maka satuan-satuan Angkatan Perang yang didukung masyarakat melaksanakan perang gerilya di seluruh daerah. Strategi Jenderal Soedirman adalah dengan menghindari kontak besar dengan unsur utama tentara Belanda, sehingga menyelamatkan Indonesia dari kekalahan total, ia lebih suka kehilangan wilayah tetapi mendapatkan waktu ekstra untuk mengkonsolidasikan pasukannya.

Selama periode antara kedua aksi militer Belanda itu, atas perintah Jenderal Soedirman, para pemimpin militer Indonesia yang dipelopori oleh A.H. Nasution dan T.B. Simatupang menyusun konsep pertahanan berdasarkan hasil analisis kegagalan yang pernah dialami selama Agresi Militer I. Mereka merumuskan suatu konsep sistem pertahanan berbeda yang berlandaskan "Wehrkreise" (lingkaran pertahanan), dan menuangkannya dalam Perintah Siasat No. 1/Stop/48 tanggal 12 Juni 1948. Perintah siasat tersebut disahkan oleh pemerintah pada 9 November 1948 menjadi Peraturan Pemerintah No. 30 dan 70, tahun 1948. Dalam sistem itu front terdapat disegala penjuru dan musuh dianggap datang dari segala arah. Pangkal perlawanan tidak berada di kota-kota, melainkan di desadesa. Satuan-satuan tentara disusun dalam unsur-unsur yang berdiri sendiri dan dapat beroperasi secara merdeka dalam satuan-satuan yang relatif kecil setingkat kompi atau kurang (Notosusanto, 1979) Sistem "Wehrkreise" yang dikembangkan oleh tentara Indonesia pada intinya membagi daerah pertempuran dalam lingkaran-lingkaran (kreise) yang memungkinkan satuan-satuan militer secara mandiri mempertahankan (wehr) lingkaran pertahanannya. Kemandirian pertahanan melingkar ini dilakukan dengan melakukan mobilisasi kekuatan rakyat dan sumber daya yang berada di lingkaran pertahanan tertentu. Sistem Wehrkreise ini kemudian dilengkapi dengan dalil-dalil perang gerilya sebagai bentuk operasional taktik militer di medan pertempuran.

Perjuangan gerilya Soedirman dan pasukannya dilakukan dengan perjalanan melewati hutan dan bukit dari desa ke desa. Soedirman mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk melakukan serangan besar-besaran agar mendapatkan pengakuan internasional terhadap eksistensi tentara Indonesia (Adi, 2011). Rencana itu diwujudkan

dengan Serangan Umum 1 Maret 1949, dengan sasaran menyerang pos-pos Belanda dan merebut kembali Yogyakarta. Serangan itu merupakan unjuk kekuatan yang sukses dan menyebabkan Belanda kehilangan muka di dunia internasional. Atas desakan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) maka pada 7 Mei 1949 digelar perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan "Perjanjian Roem-Royen". Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda harus menarik pasukannya dari Yogyakarta, beserta poin-poin lainnya. Pada tanggal 10 Juli, Soedirman dan pasukannya kembali ke Yogyakarta, mereka disambut oleh ribuan warga dan diterima dengan hangat oleh para elit politik (Sardiman, 2008). Kembalinya Jenderal Soedirman ke Yogyakarta merupakan bukti bahwa sesungguhnya tidak terjadi perpecahan antara elit militer dan elit politik, perbedaan pandangan merupakan dinamika dalam suatu perjuangan, yang hakikatnya adalah sama-sama menginginkan terwujudnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat secara penuh (Setiadi, Purwanto, 2012)

Perjuangan Diplomasi

Perjuangan Indonesia dalam politik dihadapkan pada keinginan Belanda, agar Indonesia menyepakati akan dibentuknya negara federal sebagai bagian dari persemakmuran Kerajaan Belanda. Keinginan itu tentunya mendapatkan penolakan, mengingat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah membulatkan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka seutuhnya. Kedatangan Belanda yang terlalu cepat ke Indonesia pasca proklamasi, menyebabkan upaya-upaya untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure dari dunia internasional mendapatkan hambatan dan tantangan yang tidak ringan. Menghadapi situasi ini, Presiden Soekarno menyatakan, "Kebijaksanaan yang sekarang ditempuh oleh Republik Indonesia haruslah diarahkan pada dunia Internasional. Untuk itu persyaratan utama adalah diplomasi." Perjuangan diplomasi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan pengakuan internasional secara luas dalam waktu yang singkat dan menangkis anggapan bahwa negara Indonesia adalah hadiah atau ciptaan dari Jepang. Selain itu tujuan dalam waktu singkat adalah untuk memperoleh pengakuan dari Belanda atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia serta menunjukkan bahwa rakyat Indonesia siap berkorban untuk mempertahankan kemerdekaannya (Anderson, 1972).

Untuk mendapatkan pengakuan internasional, perjalanan misi diplomatik Indonesia mulai dilakukan ke negara-negara Arab, khususnya di Mesir. Upaya ini mendapat tantangan dari Kedutaan Besar Belanda di Mesir dengan menghasut bahwa para diplomat Indonesia adalah kolaborator Jepang. Mereka juga berusaha memengaruhi mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Al-Azhar, dengan menawarkan bantuan keuangan agar para mahasiswa mengakui kekuasaan Belanda di Indonesia. Tawaran itu ditolak oleh para mahasiswa, mereka melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Belanda di Mesir, dengan membakar paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Para mahasiswa melakukan pendekatan terus menerus kepada pejabat Mesir dan wakil negara-negara Arab lainnya, saat berkumpul dalam rangka membentuk Liga Arab (Alatas, 1995). Upaya Belanda akhirnya dapat dipatahkan oleh diplomat Indonesia yang didukung para mahasiswa sehingga dapat meyakinkan pemerintah Mesir untuk mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Misi diplomatik Indonesia yang dikirim ke Mesir telah dibuka jalannya oleh para mahasiswa Indonesia di sana.

Upaya diplomasi juga dilakukan dengan pihak Belanda melalui jalan perundingan untuk menemukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada 25 Maret 1947, Syahrir bersama Soesanto Tirtoprodjo, Mohammad Roem, dan A.K Gani mewakili Indonesia, berhadapan dengan delegasi Belanda yang diwakili oleh Wim Schermerhorn, H.J. van Mook, Maz van Poll, dan Lord Killearn. Hal yang disepakati dalam Perundingan Linggarjati diantaranya adalah gencatan senjata, namun hal ini ternyata dilanggar oleh Belanda, dengan alasan perbedaan dalam penafsiran. (Mutawally, 2021) mengungkapkan, Agresi Militer Belanda I sejak tanggal 21 Juli 1947 telah memicu terjadinya kontak senjata dan perlawanan tentara Indonesia di beberapa daerah. Pada perjanjian Linggarjati Indonesia mengakui kedaulatan Belanda, dengan mendapat konsesi pengakuan de facto di Jawa dan Sumatera. Namun melalui gencatan senjata sebelum

Linggajati, tentara Belanda telah menduduki kota Jakarta dan Bandung. Belanda menerapkan strategi dengan melakukan perundingan, namun tetap melakukan upaya-upaya untuk memperluas pendudukan kota disekitarnya. Aksi Belanda ini disikapi pemerintah Indonesia dengan mendesak Dewan Keamanan PBB agar menekan pihak Belanda menghentikan aksinya. Sehingga PBB mengeluarkan resolusi pada 1 Agustus 1947 yang berisi peringatan agar konflik bersenjata dihentikan. Akhirnya pada 15 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi DK-PBB untuk menghentikan agresi militernya.

Pada 8 Desember 1947, upaya diplomasi kembali digelar melalui perundingan di atas Kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang sedang bersandar di perairan Jakarta. Indonesia diwakili oleh Haji Agus Salim sebagai Menteri Luar Negeri, bersama Perdana Menteri Amir Syarifudin, Ali Sastroamijoyo, Dr. Tjoa Sik Len, Mohammad Roem, Mr. Narsun, Dr. J. Leimena, dan Ir. Juanda. Perundingan Renville menghasilkan kesepakatan dalam penentuan batas antara wilayah Indonesia dengan wilayah Belanda (Garis van Mook). Kesepakatan ini sesungguhnya lebih menguntungkan pihak Belanda, delegasi Indonesia terpaksa menyepakatinya untuk menghindari konflik bersenjata. Namun Belanda kembali melanggar kesepakatan, pada 19 Desember 1948, terjadi Agresi Militer Belanda II. Hal ini yang membuat Jenderal Soedirman semakin tidak percaya pada jalan perundingan yang dilakukan dengan Belanda karena telah berkali-kali ingkar janji. Soedirman sempat berselisih paham dengan Presiden Soekarno, Soedirman mengajak Soekarno untuk bergerilya, namun Soekarno memilih untuk tetap bertahan di ibukota, Yogyakarta. Keputusan ini menyebabkan Soekarno, Hatta, dan para pejabat negara ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke luar Jawa.

Dengan ditangkapnya para pemimpin bangsa bukan berarti perjuangan politik dan diplomasi terhenti, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara di Bukittinggi mengambil alih tugas menjaga eksistensi negara. Sementara di luar negeri, para pejuang dipomasi tetap bergerak, menggalang dukungan dari dunia internasional. Sjafruddin pada 31 Maret 1949 menunjuk A.A. Maramis, sebagai Menteri Luar Negeri yang berkedudukan di New Delhi, India. Para pejuang diplomasi lainnya di luar negeri, seperti Dr. Soedarsono sebagai wakil Indonesia di India, Soemitro Djojohadikoesoemo yang saat itu sedang di Amerika Serikat untuk menjalin kerjasama ekonomi, juga L.N. Palar sebagai perwakilan Indonesia di PBB sejak 1947 (Anwar, 2009). Para pejuang diplomasi terus bergerilya dari satu negara ke negara lain. Mereka juga diundang Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, untuk menghadiri Konferensi Inter-Asia di New Delhi pada 20-23 Januari 1949 yang membahas secara khusus persoalan Indonesia. Palar dan para diplomat terus mendesak PBB agar dapat bersikap tegas terhadap Belanda, upaya itu menghasilkan Resolusi DK-PBB pada 28 Januari 1949 yang membuat Belanda semakin terdesak. Adanya Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dilakukan tentara Indonesia di Yogyakarta memperkuat kedudukan Indonesia di dunia Internasional bahwa bangsa Indonesia tidak akan mundur selangkahpun untuk merebut kemerdekaannya.

Ketegangan yang semakin meningkat antara pemerintah Belanda dan Indonesia mendorong dilakukannya kembali Perundingan Roem-Royen yang berlangsung cukup alot pada 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Pada 7 Mei 1949 ditandatangani hasil kesepakatan dari Perundingan Roem-Royen yang memutuskan bahwa akan diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk membahas rencana penyerahan kedaulatan Indonesia secara penuh dan tanpa syarat oleh pihak Belanda. KMB menjadi senjata pamungkas bagi Indonesia untuk mendapatkan legitimasi menjadi negara yang merdeka seutuhnya, hingga pada 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh.

Masa Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) merupakan masa bersejarah yang sangat penting dalam perjuangan penegakkan kemerdekaan, yang menentukan karakter atau watak politik luar negeri Indonesia, yaitu cinta perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan. Perang gerilya yang dilakukan oleh tentara Indonesia membuktikan kepada negara-negara lain dan PBB bahwa Indonesia memiliki militer yang cukup baik dan mampu sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka yang lain. Perjuangan gerilya memberikan efek penggentar bagi Indonesia terhadap Belanda sehingga berpikir seribu kali untuk dapat

menguasai kembali Indonesia. Perjuangan gerilya diplomasi menjadi kunci diakuinya kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Perjuangan diplomasi tidak hanya dilakukan oleh para tokoh diplomat Indonesia, tetapi para mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri juga turut serta melakukan gerilya diplomasi. Hal ini membuktikan bahwa pada hakikatnya dalam perjuangan diplomasi juga telah menerapkan Strategi Perang Semesta.

Dukungan dan Mobilisasi Rakyat

Menurut Yank Levy (1941) dalam bukunya *Guerilla Warfare*, wilayah atau tempat menjalankan perang gerilya, harus dikuasai oleh para pejuang gerilya (Ariwibowo, 2021), baik desa, pegunungan, jalan raya dan lain-lain. Oleh karena itu wilayah harus diketahui dan dikuasai sepenuhnya baik dalam situasi malam maupun siang hari. Jatuhnya Kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948 ke tangan Belanda akibat adanya agresi militer, menjadikan suasana revolusi mulai mewarnai kehidupan di wilayah pedesaan. Sejak saat itu, wilayah pedesaan menjadi tempat pertahanan bagi tentara Indonesia dan tempat pengungsian bagi penduduk dari kota. Suasana revolusi mewarnai kehidupan dan menimbulkan kegiatan tambahan bagi penduduk desa. Mereka melakukan penjagaan dan pengawasan di luar desa. Selain itu ada yang menggabungkan diri pada kesatuan pejuang yang bermarkas di desa setempat, terutama para pemudanya. T.B. Simatupang, mengibaratkan kekuatan yang tersimpan di pedesaan yang telah dibangkitkan selama revolusi dikatakannya laksana kekuatan sebuah sungai yang sedang banjir.

Tentara Indonesia dan para pejuang berada dalam setiap desa, hal ini sebagai penerapan taktik berupa lingkaran pertahanan (*Wehrkreise*). Pelosok-pelosok desa akhirnya dipakai sebagai pusat-pusat perlawanan terhadap Belanda. Gunung-gunung dan hutan menjadi pusat kegiatan gerilya. Rakyat desa pada umumnya menyambut dengan baik keberadaan tentara yang ada di desanya. Para tentara itu dibantu menurut kemampuan masing-masing, baik moral maupun materiil dengan kesadaran penuh dan secara sukarela. Hal semacam itu juga dilakukan kepada semua alat negara yang menyelenggarakan pemerintahan Indonesia di desa-desa. Sebagai gambaran dukungan yang diberikan terhadap jalannya perang gerilya adalah situasi yang ada di Desa Banaran, tempat T.B. Simatupang menjadikan sebagai basis operasinya. Masyarakat desa di Dusun Banaran memiliki sifat yang sangat ramah, terbuka dan menunjukkan dukungan serta loyalitas yang tinggi kepada Indonesia dan tentara Indonesia. Kegiatan penting yang dilakukan T.B. Simatupang sebagai Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang pada saat berada di Banaran yaitu mengadakan rapat strategi militer bersama dengan Kolonel Bambang Sugeng pada 18 Januari 1949 yang membahas seputar rencana Serangan Umum ke Yogyakarta.

Masyarakat Desa Banaran mampu menunjukkan peran aktif dalam perjuangan, hal tersebut dapat terlihat dari kegiatan-kegiatannya, antara lain: (1) memberikan perlindungan yang efektif terhadap semua kegiatan gerilyawan dengan latihan kemiliteran dan tugas jaga; (2) rumah Karyoutomo digunakan sebagai markas T.B. Simatupang dan merupakan pusat aktivitas perjuangan gerilya serta digunakan juga sebagai dapur umum selama perang gerilya; (3) mengadakan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan bagi para tentara kurang lebih 150 orang dan para pengungsi dari Yogyakarta; (4) beberapa pemuda termasuk Karyoutomo bersedia menjadi kurir pos untuk menyampaikan surat-surat dan berita-berita penting secara estafet; (5) Beberapa warga Desa Banaran dan sekitarnya dengan ikhlas menjadi barisan•penyelidik atau mata-mata untuk menyelidiki kekuatan pasukan Belanda; (6) beberapa warga desa dengan senang hati mendapatkan pendidikan keterampilan dan pengetahuan bahasa Inggris dari Bapak Ali Budiarjo dan Mr. Sastro Pawiro.

Ketika tentara Belanda berhasil menduduki Kota Yogyakarta, reaksi masyarakat sangat cepat dan mereka segera mengkonsolidasikan diri guna membentuk laskar. Sebelum semua jaringan yang diperlukan oleh pemerintah militer berjalan dengan lancar, Laskar Rakyat yang telah ada di Sleman secara improvisasi menjalankan gerakan bersama pamong desa. Laskar Rakyat yang lahir sesudah Kota Yogyakarta diduduki oleh Belanda misal di Kecamatan Mlati, Sleman dan Ngaglik. Anggota Laskar Rakyat Sleman waktu itu semula kebanyakan hanya bersenjatakan benda-benda tajam seperti belati dan pedang. Ada di antara mereka yang membawa sipat kandel dalam bentuk keris, tombak dan sabuk yang

bertuliskan huruf Arab. Dengan membawa senjata pusaka semacam itu, mereka merasa bertambah berani dan bersemangat untuk ikut ke medan perang. Untuk dapat mengerahkan unsur pemuda, maka dikeluarkan perintah resmi berdasarkan instruksi Panglima Komando Jawa yang ditandatangani oleh Kolonel A.H. Nasution pada 25 Januari 1948 Nomor. 11 /MB-KD/48, tentang keikutsertaan pemuda desa dalam menjalankan perang gerilya.

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi aksi militer Belanda dengan cara gerilya diperkuat dengan pembentukan pasukan mobil dan pasukan teritorial. Pasukan mobil adalah bagian dari pasukan gerilya, yang bertugas untuk melakukan sabotase terhadap musuh, menjadi penggempur sasaran musuh seperti penghadangan patroli konvoi Belanda, pengacauan pos-pos Belanda yang terpencil, pemutusan jalan, pemutusan jembatan, pemutusan kabel listrik dan kabel telepon, pembakaran pabrik-pabrik maupun rumahrumah yang diperkirakan akan dipakai sebagai pos-pos Belanda. Dengan demikian, sesuai dengan tugasnya pasukan ini selalu bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Selain itu juga dibentuk pasukan teritorial yang bertugas mengumpulkan bahan makanan baik berupa bahan mentah maupun bahan pangan yang sudah masak. Selain itu pasukan teritorial juga bertugas menjadi pelindung bagi para pengungsi.

Tantangan terberat pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia adalah belum tersusunnya organisasi tentara reguler secara utuh. Hal ini disadari oleh Nasution, bahwa untuk melakukan Perang Rakyat Semesta tetap diperlukan adanya pasukan inti (komponen utama) yang profesional, sehingga harus ada upaya untuk mengatur keberadaan pasukan-pasukan partikelir. Masih adanya berbagai badan atau kelompok pejuang, seperti Hisbullah, Pesindo, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), Barisan Banteng, dan Laskar Rakyat yang kekuatannya relatif berimbang dengan Tentara Republik Indonesia (TRI) bahkan di beberapa daerah kekuatannya lebih dominan. Atas pertimbangan tersebut, maka dilakukan upaya peleburan satuan-satuan perjuangan dengan susunan organisasi dan persenjataan yang lebih efektif menjadi Resimen Perjuangan. Bersamaan dengan proses rekrutmen laskar-laskar perjuangan dalam TRI, dilakukan pula upaya rasionalisasi terhadap TRI. Kekuatan Batalyon disesuaikan dengan rasio senjata 115 dan rasionalisasi kepengkatan.

Pada tahun 1946, dibentuk Barisan Cadangan sebagai pendukung tentara Indonesia. Pembentukan Barisan Cadangan ini merupakan salah satu strategi dari "Pertahanan Bulat (Total) Lagi Teratur". Keberadaan Barisan Cadangan ini ditetapkan berdasarkan Ketetapan Dewan Pertahanan Negara Nomor. 85 Tahun 1947 tentang Pertahanan Rakyat. Ketetapan ini merupakan penjabaran dari konsep "Pertahanan Rakyat Total", yang diartikan bahwa segala lapisan rakyat, baik pegawai negeri, maupun orang, atau badan partikelir di seluruh daerah Indonesia harus turut serta di dalam perlawanan dengan sehebat-hebatnya, dan masing-masing dalam pekerjaan dan kewajibannya. Konsep pertahanan total ini kemudian diikuti dengan militerisasi instansi-instansi pemerintahan.

Untuk dapat mendukung pelaksanaan perang gerilya, pada tahun 1948 disusun suatu pemerintahan gerilya yang totaliter, yaitu: Pagar Praja/Kelurahan, Komando Onder Distrik Militer (KODIM)/Kecamatan, Komando Distrik Militer (KDM)/Kabupaten, dan Sub Teritorial Komando (STC)/Gubernur. Pimpinan masing-masing, selain sebagai komandan pertempuran juga menjadi kepala pemerintahan gerilya secara totaliter dengan bantuan badan-badan sipil seperlunya, dan seluruh rakyat dapat ikut serta dalam pertempuran disegala lapangan (Narasi., 2012) Organisasi teritorial ini mendampingi pemerintahan sipil, dalam keadaan biasa KDM dan KODM berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan antara militer dan sipil, tetapi dalam keadaan perang mereka merupakan satu alat pemerintahan bersama-sama Pamong Praja mengemudikan pemerintahan militer di bawah instansi militer. Pihak Pamong Praja tetap menjalankan kekuasaan seperti biasa, hanya ia bertanggungjawab pada instansi militer dan segala sesuatu yang akan dijalankan harus berdasarkan kepentingan militer.

Dari Gerilya Menjadi Semesta

Dalam menghadapi agresi militer dan berbagai aksi bersenjata yang dilakukan oleh Belanda, tentara Indonesia tidak dapat berbuat banyak, dalam waktu singkat Belanda telah

dapat merebut semua kota penting dan jalan-jalan utama. Jika dianalisa berdasarkan perbandingan daya tempur relatif, sesungguhnya kekuatan tentara Indonesia pada saat itu tidak sebanding dengan kekuatan militer Belanda. Meskipun pada saat itu banyak pemuda yang terlatih dan pernah tergabung dalam 60 Batalyon PETA di Jawa, dan berhasil merebut senjata dari Jepang yang cukup untuk beberapa Divisi, namun organisasi tentara Indonesia saat itu masih belum tersusun secara proporsional. Faktor berpengaruh lainnya bukan hanya waktu yang terbatas, tetapi juga profesionalitas pasukan yang terlatih belum terwujud sepenuhnya. Di sisi lain, Indonesia belum memiliki strategi militer dan strategi nasional yang menjadi pedoman dalam setiap langkah menghadapi berbagai bentuk ancaman. Gerilya yang dilakukan baru pada tingkatan melelahkan musuh, belum sampai pada tingkatan menghancurkan walaupun bagian demi bagian. Ketidakmampuan dalam menghadapi kekuatan tentara yang tidak seimbang, mendorong diterapkannya taktik gerilya, hal itu merupakan pilihan yang sangat rasional dan tepat pada saat itu.

Nasution mendefinisikan perang gerilya sebagai bagian dari Perang Rakyat Semesta. Oleh karena itu, kunci dari keberhasilan gerilya adalah kesatuan antara militer dan rakyat. Dalam menggambarkan Perang Rakyat Semesta, Nasution berpendapat bahwa yang berperang bukan hanya tentara. Rakyat juga berperang dan membentuk angkatan bersenjata sendiri. Itulah mengapa tentara disebut sebagai tentara rakyat dan bukan entitas yang terpisah. Ia tidak menyarankan seluruh penduduk berperang, 98% populasi hanya membantu dan mendorong mereka yang melakukan pertempuran sebenarnya. Yang terpenting adalah hubungan antara prajurit dan rakyat, karena yang diperjuangkan adalah ideologis rakyat, sehingga prajurit harus mengakar seutuhnya dalam jiwa rakyat, rakyat merupakan fondasi perjuangan (Cribb, 2001). Kesemestaan didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Pengalaman Nasution selama menjabat Panglima Divisi Siliwangi memberikan dasar yang memengaruhi pemikiran dan pandangannya baik dalam kehidupan pribadi dan karirnya, maupun dalam memikirkan strategi nasional, strategi militer, pembinaan sosial politik, pembinaan wilayah, serta penegakkan identitas perjuangan nasional dan Tentara Nasional Indonesia. Pengalaman itu juga memberikan sumbangan berharga dalam mempersiapkan Perang Semesta pada tahun 1948 disaat menjabat sebagai Wakil Panglima Besar dan Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang. Berperang bukan lagi tentara melawan tentara melainkan rakyat melawan rakyat. Ilmu perang bukan saja taktik, strategi dan logistik, melainkan ilmu politik, propaganda, ekonomi dan sosial pula. Pemimpin perang harus menguasai kenegaraan, perekonomian dan propaganda, tidak saja ahli dalam bertempur (Narasi., 2012). Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Kemerdekaan Indonesia seutuhnya merupakan hasil perpaduan yang sukses antara perjuangan diplomasi politik dan perjuangan bersenjata. Terlepas adanya perbedaan pandangan dari elit militer maupun elit politik terhadap cara yang ditempuh, namun Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949 telah membuktikan bahwa apapun bentuk perjuangan harus dilakukan di semua lini dengan mengerahkan segenap sumber daya yang kita miliki untuk satu tujuan yang sama. Tanpa perjuangan bersenjata menghadapi pasukan Belanda upaya diplomatik akan menjadi sia-sia, demikian pula sebaliknya, tanpa adanya upaya diplomasi di dunia internasional maka perjuangan bersenjata akan menjadi sia-sia. Perjuangan bersenjata merupakan upaya moral dan diplomatik, menginspirasi pasukan yang mengalami demoralisasi di seluruh Indonesia, serta membuktikan kepada PBB bahwa tentara Indonesia masih ada dan mampu berperang. Serangan itu telah menurunkan moral pasukan Belanda, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa pasukan Indonesia dapat menyerang dan menguasai kota. Hal ini membuktikan kebenaran dari pendapat Clausewitz, menurutnya perang bukanlah hanya sekedar berasal dari kebijakan, tetapi perang merupakan instrumen politik, kelanjutan dari kegiatan politik dengan cara lain (Herman &

Mardison, 2021). Hal inilah yang sejatinya menjadi pemikiran yang lebih strategis dari Perang Semesta di masa depan.

SIMPULAN

Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, dari tonggak-tonggak Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi 1945. Perjuangan yang dilakukan oleh segenap komponen bangsa telah berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Periode Perang Kemerdekaan telah melahirkan konsep strategi nasional dan strategi militer berupa "Sistem Pertahanan Semesta", berdasarkan pengalaman sejarah yang digali dari perjuangan bersenjata, perjuangan diplomasi dan perjuangan diberbagai aspek kehidupan bangsa.

Perang Kemerdekaan Indonesia pada hakekatnya merupakan gambaran dari Perang Rakyat Semesta yang tidak hanya dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi juga bergerak di lapangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Strategi Perang Semesta telah diterapkan oleh para pejuang baik dalam perjuangan bersenjata maupun perjuangan diplomasi, nilai-nilai Perang Semesta yang bercirikan: kerakyatan, kewilayahan, kesemestaan, telah tertanam dalam setiap nafas perjuangan. Keikutsertaan seluruh masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing, dan pemberdayaan segenap sumber daya nasional secara maksimal untuk selanjutnya dipadukan dengan kekuatan militer, menjadi suatu bentuk "totalitas" yang ampuh dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman.

Dari sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949 yang melahirkan konsep Perang Semesta, telah menunjukkan dan membuktikan bahwa keterlibatan segenap komponen bangsa, baik dari militer dan sipil (non militer) memiliki peran penting sesuai dengan bidangnya masing-masing. Klaim sepihak, bahwa pendekatan militer ataupun pendekatan politik lebih penting, seringkali berdampak pada perdebatan tak berujung yang dapat memperkeruh hubungan sipil dan militer dan situasi ini justru melemahkan hakikat Perang Semesta itu sendiri. Seringkali kita lupa bahwa fungsi dari pertahanan negara adalah mewujudkan satu kesatuan pertahanan yang mampu menjaga keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan negara, dan melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman yang timbul, baik berupa ancaman militer maupun non militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. Kresna. (2011). *Soedirman: Bapak tentara Indonesia*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Alatas, Ali. (1995). "Sambutan Menteri Luar Negeri RI" dalam seminar hubungan Indonesia - Mesir dilihat dari tinjauan sejarah. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI. 14.
- Anderson, Benedict. (1972). *Java in a time of revolution: Occupation and resistance* (pp. 1944–1946). pp. 1944–1946. Newyork: Cornell University Press.
- Anwar, Rosihan Anwar. (2009). *Sejarah kecil "Petite Histoire" Indonesia*. Jakarta: Kompas. 119.
- Ariwibowo, Tjandra. (2021). Strategi Perang Semesta: Pertempuran Pangeran Diponegoro Menghadapi Belanda 1825-1830. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5), 2537–2550.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cribb, Robert. (2001). *Military strategy in the Indonesian revolution: Nasution's concept of 'Total People's War' in theory and practice*.
- Herman, Herman, & Mardison, Safri. (2021). Kontribusi Jenderal Besar Ah Nasution Terhadap Dwifungsi Abri (1958-1998). *Journal Cerdas Mahasiswa*, 3(2), 240–253.
- Kusuma, Endra, Anwar, Syaiful, Risman, Helda, & Arief, Ruslan. (2021). PERTEMPURAN SURABAYA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF PERANG SEMESTA. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2825–2836.
- Mutawally, Anwar Firdaus. (2021). *NEGARA INDONESIA TIMUR: Dari Negara Federasi hingga Integrasi dalam Republik Indonesia*.
- Narasi., Nasution. A. H. (2012). *Pokok-pokok gerilya dan pertahanan RI dimasa lalu dan*

yang akan datang. Yogyakarta.

Notosusanto, Nugroho. (1979). *Tentara Peta*. Jakarta: Gramedia.

Nurbantoro, Endro, Risman, Helda, Widjayanto, Joni, & Anwar, Syaiful. (2021). *Analisa Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019*. OSF Preprints.

Poetri, Dara Yandina. (2021). Bentuk Perang Baru di Abad Ke 21 Studi Kasus: Perang Sipil di Liberia 1989-2003. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(2), 205–214.

Press, U. G. M. (2021). *Peran Surabaya dalam Revolusi Nasional 1945*. UGM PRESS.

Setiadi, Purwanto, Yuliawati. (2012). *Sudirman: A Soldier's story*. *Tempo English* (pp. 14–51). pp. 14–51. Jakarta: Arsa Raya Perdana.

Supriadi, D. R. Asep, & SH, M. H. (2021). *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perspektip Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni.